

BAB 1

PENDAHULUAN

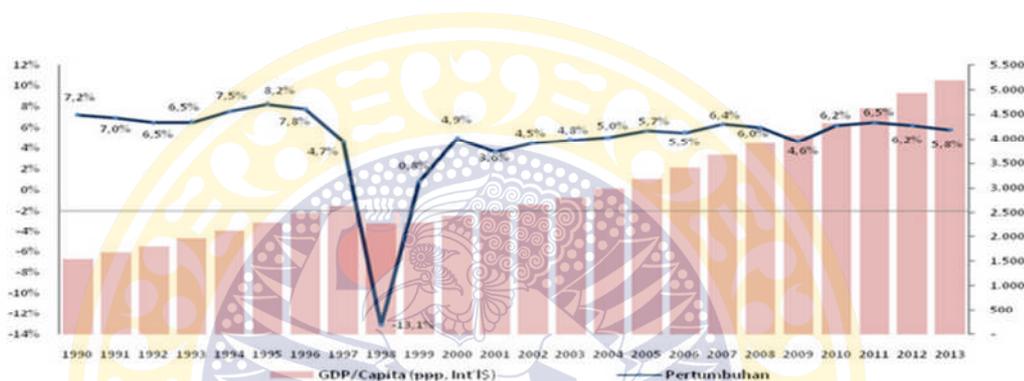
1.1 Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat pada setiap periodenya. Hal ini disebabkan karena faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya, investasi menambah modal, teknologi yang dipergunakan menjadi berkembang dan juga tenaga kerja akan bertambah sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan suatu negara. Pada pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan utama bagi negara sedang berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan suatu negara dari negara lain.

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi cukup stabil dari tahun 1990-1996 yaitu dengan rata-rata sebesar 7,2%. Namun, perekonomian Indonesia akhirnya menurun disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda secara global di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan tingkat penurunan

pada pertumbuhan ekonomi yaitu: -13,7% pada tahun 1998 dan 0,8% pada tahun 1999. Pasca krisis, perekonomian Indonesia perlahan mulai mengalami peningkatan, pada tahun 2001 sampai tahun 2004 pertumbuhan ekonomi naik dari 4% menjadi 5,1%. Lalu pada tahun 2004 sampai tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sudah relatif lebih stabil dengan presentase di atas 6%.



Sumber: BPS-indikator sosial ekonomi Indonesia dan IMF World economic outlook database

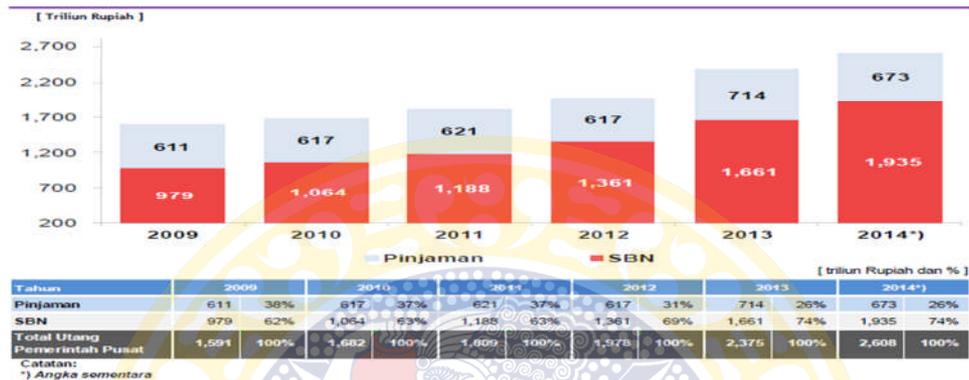
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita periode 1990-2013

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang membutuhkan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya keterbatasan modal di Negara Indonesia ini, maka pemerintah membutuhkan dana yang berasal dari hutang. Hutang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Hutang terdiri dari hutang luar negeri dan hutang dalam negeri. Hutang luar negeri pemerintah adalah hutang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari hutang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, *leasing* dan Surat

Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang *Ijarah Fixed Rate* (IFR) dan Global Sukuk. Pinjaman yang berasal dari dalam negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. (BSPUN, Depkeu, 2014: 4)

Indonesia dilanda krisis ekonomi pada sekitar pertengahan tahun 1997, salah satu penyebab krisis ekonomi adalah hutang luar negeri (Kusumawati, 2011). Perkembangan hutang luar negeri mengarah pada sumber utama pembiayaan defisit. Hutang luar negeri pemerintah yang semula lebih mengutamakan pinjaman bersyarat lunak beralih menjadi pinjaman komersil, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kedua alasan tersebut mengakibatkan jumlah hutang luar negeri pemerintah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana bunga dan pembayaran pokok pinjaman setiap tahunnya semakin besar. Kenaikan bunga dan pembayaran pokok pinjaman menimbulkan permasalahan hutang luar negeri pemerintah yang disebabkan gejolak nilai tukar pada waktu terjadi krisis ekonomi, sehingga jumlah hutang luar

negeri yang harus dibayarkan meningkat. Hal tersebut menyebabkan hutang luar negeri pemerintah menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997.



Sumber: BSPUN (Gov Debt Profile) edisi Desember 2014

Gambar 1.2 Posisi Hutang Pemerintah Indonesia periode 2009-2014

Berdasarkan Gambar 1.2, hutang pemerintah Indonesia pada setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh peningkatan rasio *Debt Service Ratio* (DSR) karena semakin besar rasio *Debt Service Ratio* (DSR) maka semakin besar beban hutang yang ditanggung. *Debt Service Ratio* (DSR) adalah jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor.

Debt Service Ratio (DSR) mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar hutang. Ambang batas angka DSR lazimnya adalah sebesar 20%. (Lukman, 2013) Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa rasio DSR pada akhir September 2014 mencapai 46,16%, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2013 sebesar 44,29%

(Sumber: Bank Indonesia, 2014). *Debt Service Ratio* (DSR) meningkat karena jumlah hutang terus bertumbuh ketika penerimaan dari ekspor menurun. Upaya untuk memperbaiki angka *Debt Service Ratio* (DSR) dapat dilakukan dengan cara akselerasi peningkatan ekspor untuk meningkatkan pendapatan. Dengan melihat kondisi tersebut dan menghubungkannya dengan pertumbuhan ekonomi maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh hutang pemerintah dalam negeri, hutang pemerintah luar negeri dan *Debt Service Ratio* (DSR) di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hutang pemerintah dalam negeri, hutang pemerintah luar negeri, dan *Debt Service Ratio* (DSR) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek tahun 1980-2013?
2. Apakah hutang pemerintah dalam negeri, hutang pemerintah luar negeri, dan *Debt Service Ratio* (DSR) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang tahun 1980-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh variabel hutang pemerintah dalam negeri, hutang pemerintah luar negeri, dan *Debt Service Ratio* (DSR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek tahun 1980-2013.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh variabel hutang pemerintah dalam negeri, hutang pemerintah luar negeri, dan *Debt Service Ratio* (DSR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek tahun 1980-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan bagi ilmu ekonomi, khususnya ilmu ekonomi pembangunan.

2. Manfaat kebijakan

Memberikan masukan yang bermanfaat kepada pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait mengenai pertumbuhan ekonomi, hutang pemerintah dalam negeri, hutang pemerintah luar negeri, dan *Debt Service Ratio* (DSR).

3. Manfaat praktis

Memberikan stimulus bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya yang berminat meneliti mengenai analisis pengaruh hutang pemerintah dalam negeri, hutang pemerintah luar negeri,

dan *Debt Service Ratio* (DSR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1980-2013.

1.5 Sistematika Skripsi

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab memberikan penjelasan secara terperinci serta berhubungan dengan rumusan masalah skripsi. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar baik teoritis maupun fakta yang menimbulkan minat untuk melakukan penelitian, rumusan masalah yang memerlukan pemecahan dan jawaban melalui penelitian yang dilakukan serta tentang tujuan yang ingin dicapai serta manfaat penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Selain itu juga menyebutkan tentang penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan peneliti lain, selanjutnya diuraikan pula model analisis yang akan digunakan serta hipotesis berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang relevan.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang meliputi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas secara rinci mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian, pembahasan mengenai analisa disertai dengan perhitungan dan pembuktiannya. Pada bab ini juga akan menjawab permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini berdasarkan hasil penghitungan dan landasan teori yang relevan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan penulis sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, sesuai dengan hasil yang ditentukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan dapat berguna.